

# RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN ..	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	6
1.3	Maksud dan Tujuan .....	8
1.4	Sistematika Penulisan .....	9
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	11
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renja PD .....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	23
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	31
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	41
3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah...	41
BAB IV	PENUTUP .....	47

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai Triwulan II dan Capaian Renja PD .....	12
Tabel 2.2	Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan s/d Bulan Juni 2020 .....	22
Tabel 2.3	Capaian Program Tahun 2019 .....	28
Tabel 2.4	Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	30
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Program Tahun 2020 .....	40
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penanganan.....	5
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa jika diindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan berikut Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2020 menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Hasil simulasi BI, proyeksi PDRB Jateng hanya akan tumbuh di bawah 5 persen yang akan berimbas di Kabupaten Purworejo.

Mengacu pada asumsi Pemerintah Pusat, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo yang semula dalam RKPD Tahun 2020 ditetapkan 6,64% mengalami penurunan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 2,3% menyesuaikan adanya bencana non alam akibat pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan asumsi ini akan berdampak langsung kepada target pendapatan daerah yang akhirnya akan berdampak pula terhadap rencana belanja daerah untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta berdampak tidak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah.

Asumsi dasar ekonomi makro yang lain adalah laju inflasi. Peningkatan laju inflasi juga berpengaruh positif terhadap pendapatan dan belanja daerah, karena dampak kenaikan pada

pendapatan daerah lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja daerah.

Kabupaten Purworejo mengalami inflasi fluktuatif, pada tahun 2017 mencapai 4,29% sementara di tahun selanjutnya (2018) turun pada angka 3,10% (terjadi deflasi), dan di tahun 2019 menjadi 2,47%. Melihat di tahun terakhir, kondisi inflasi Kabupaten Purworejo lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah (2,78%) dan Indonesia (2,68%). Tahun 2020 ini inflasi diperkirakan naik akibat pandemi Covid 19 menjadi 4+ 1%.

#### **1.1.1. Proses Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya sama dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dikerjakan secara simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan:

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang mengakibatkan pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Perkembangan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat, dan/atau keperluan mendesak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Adanya kegiatan prioritas daerah yang harus segera dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021;
- f. Adanya kegiatan baru yang harus dilaksanakan di tahun 2020 karena pendapatan untuk kegiatan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan;

g. Adanya belanja bersifat wajib dan/atau mengikat yang belum teralokasikan atau belum tercukupi.

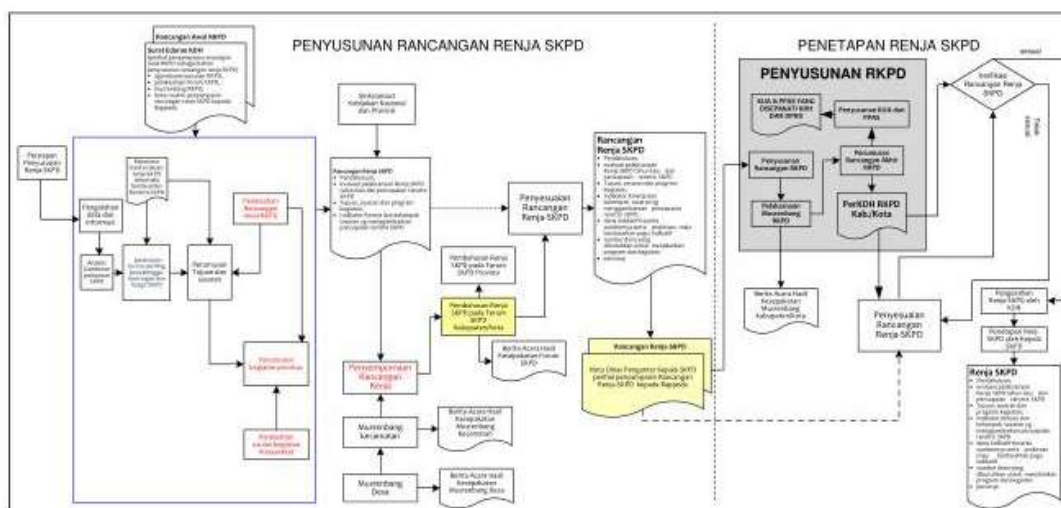
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun berpedoman pada Surat Edaran Bupati Purworejo tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan, untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020.

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 untuk menilai dan memastikan bahwa Renja Perubahan Perangkat Daerah telah disusun sesuai Surat Edaran perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020. Hasil verifikasi menjadi Perubahan RKPD Tahun 2020 dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo tahun 2020, Perangkat Daerah menyempurnakan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2020, kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi kembali guna menilai dan memastikan bahwa Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 telah disusun sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2020.

Kepala Bappeda mengajukan rancangan akhir seluruh Renja Perangkat Perubahan Daerah Tahun 2020 kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan. Berdasarkan pengesahan tersebut, Kepala Perangkat Daerah Menetapkan Perubahan Rencana Kerja masing-masing. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



### 1.1.2. Keterkaitan Antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan pagu indikatif per program. Renja Perubahan Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan rencana strategis lima tahunan, memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan pagu indikatif. Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKAP SKPD), dimana kumpulan RKAP SKPD akan menjadi RAPBDP yang selanjutnya akan disepakati oleh DPRD dan ditetapkan menjadi APBDP

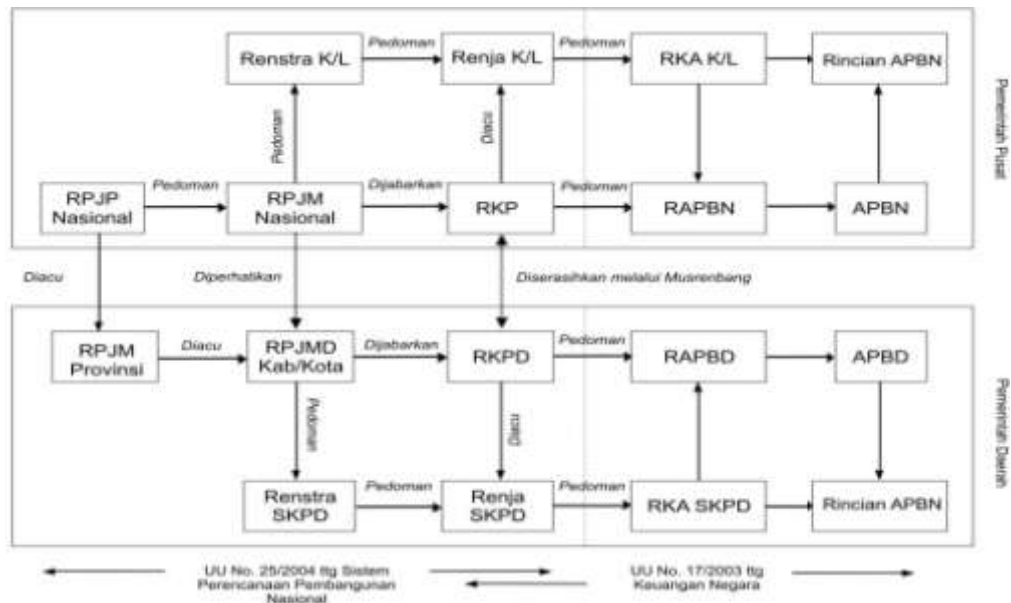
Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen satu tahunan berisi program, kegiatan dan pagu indikatif yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) untuk mencapai target-target program dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD dan Renstra dalam rangka mendukung



tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.2  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



### 1.1.3. Tindak Lanjut Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Purworejo Nomor 040.22/4.618/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, menyatakan bahwa tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Purworejo tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
2. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD tahun 2020.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4829);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi di Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwoejo Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
21. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
23. Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 040.21/5154/2020 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan daerah yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun lalu. Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 bertujuan untuk:

1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan (2020);
2. Menyediakan acuan bagi penyusunan perubahan KUPA/ Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perubahan BPBD Tahun 2020.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan penyusunan Renja Perubahan, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan PD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan ketentuan pertauran lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan PD

#### **1.4. Sistematika penulisan**

Memuat pokok bahasan penulisan Renja Perubahan PD serta susunan garis besar isi dokumen Renja

### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II dan Capaian Renja PD**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengemukakan permasalahan - permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.

### 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat antara lain:

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tabel mengenai rencana kerja dan pendanaan

Perbahan Rencana Kerja Tahun 2020

## BAB IV PENUTUP

Memuat penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan, rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai Triwulan II dan Capaian Renja PD**

Melalui APBD Tahun Anggaran 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang semula melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan menjadi 7 program dan 22 kegiatan. APBD mengalami refokusing dan realokasi untuk percepatan penanganan Covid-19. Anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksana Anggaran BPBD tahun 2020 yang semula sebesar Rp.3.376.945.200 dilakukan refokusing menjadi sebesar Rp.1.688.472.270.

Adapun pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan Bulan Juni 2020 capaian realisasi fisik sebesar 63,05% dan keuangan sebesar 56,02%. Dari anggaran yang tersedia sejumlah Rp.1.688.472.270. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Periode sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai**  
**Triwulan II dan Capaian Renja PD**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Rp(%)	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7				8				9		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																								
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial																							
1		Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	27	155.050.000	25	39.951.276	0	8.445.800	-	6.473.600	0,00	1.972.000	0,00	8.445.600	100%	100	25	48.396.876	93%	31%	APBD				



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana			
										I	II											
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		2.184.355.790		1.223.136.447		241.257.870				125.207.206		51,90		1.348.343.653					
2		Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	72	163.594.290	48	100.842.000	12	15.585.500	3	3.910.900	3	3.771.300	6	7.682.200	52%	49%	54	108.524.200	75%	66%	APBD
3		Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	72	642.872.100	48	342.649.571	12	104.694.470	3	24.222.980	3	23.795.896	6	48.018.876	51%	46%	54	390.668.447	75%	61%	APBD
4		Pengelolaan kebersihan kantor	Layanan kebersihan kantor	72	152.058.270	48	79.895.764	12	29.397.400	3	3.695.200	3	10.783.800	6	14.479.000	56%	49%	54	94.374.764	75%	62%	APBD
5		Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	72	1.225.831.130	48	699.749.112	12	91.580.500	3	35.042.630	3	19.984.500	6	55.027.130	65%	60%	54	754.776.242	75%	62%	APBD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana
										I	II								
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	1.562.311 .550	832.685. 970	193.506 .600			52.957. 534		125.653. 019				958.338. 989				
6		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	36 153.581.30 0	17 31.663.20 0	18 10.057.2 00	4	2.081.0 00	9	3.231.5 00	13	5.312.50 0	60%	53%	30	36.975.7 00	83%	24%	APBD
7		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 390.077.35 0	4 246.575.9 23	1 45.084.0 00	0,2 5	4.564.0 00	0,5 4	30.615. 434	0,7 9	35.179.4 34	79%	78%	4,7 9	281.755. 357	80%	72%	APBD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Renstra Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II					
8		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	132	859.562.000	112	445.730.089	24	88.995.600	6	20.180.485	6	16.066.900	12	36.247.385	50%	41%	124	481.977.474	94%	56%	APBD
9		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	40	159.090.900	31	108.716.758	9	49.369.800	9	45.870.000	0	3.043.700	9	48.913.700	100%	99%	40	157.630.458	100%	99%	APBD
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		511.687.992		158.649.346		3.464.500				1.230.000		3.464.500				162.113.846			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II					
10		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	100	511.687.992	0	158.649.346	0	3.464.500	0,30	2.234.500	0,36	1.230.000	0,66	3.464.500	100%	100%	0,66	162.113.846	1%	32%	APBD
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan		355.258.742		230.677.331		25.755.500		14.384.000		4.240.100		18.624.100				249.301.431			
11		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	112	159.998.600	76	98.009.350	18	9.678.400	5	2.713.000	5	2.228.500	10	4.941.500	53%	51%	76	102.950.850	68%	64%	APBD
12		Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	39	195.260.142	24	132.667.981	6	16.077.100	4	11.671.000	1	2.011.600	5	13.682.600	98%	85%	27	146.350.581	69%	75%	APBD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana	
										I	II									
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase tersedianya data dasar pembangunan	758.785.880	103.666.000	61.852.000		14.172.200		24.366.000				128.032.000						
13		Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	6 758.785.880	4 103.666.000	1 61.852.000	0,2 3	10.193.800	0,2 6	14.172.200	0,4 9	24.366.000	49%	39%	4,4 9	128.032.000	75%	17%	APBD	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun 2020 (%)		Sumber Dana
										I	II							
	Optimalnya pelayanan penanganan bencana dan kebakaran di daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	14.984.223.475	7.200.242.863	1.154.190.000			214.083.511	640.067.266			7.840.310.129					
			Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana															
			Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan															
			Cakupan wilayah pencegahan bencana															
			Kelompok jejaring kebencanaan															

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana			
				I	II	I	II	I	II	I	II		I	II	I	II						
			Persentase ketersediaan analisis jenis bencana																			
			Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana																			
14		Posko Siaga SAR	Layanan Posko Siaga SAR Penyediaan tenaga kebencanaan	72	914.202.500	48	1.212.294.578	3	322.000.800	3	53.416.800	3	80.125.200	6	133.542.000	50,00	41,47	54	1.345.836.578	75%	147%	APBD
15		Pelatihan SAR Penanganan Bencana	Personil SAR telatih Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	360	1.276.529.000	191	434.992.833	60	66.357.800	60	65.127.550		1.180.000	60	66.307.550	100,00	99,92	251	501.300.383	70%	39%	APBD
16		Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Pembentukan Desa Tangguh	380	760.000.000	290	966.061.230	3	3.735.000	3		0	3.735.000	3	3.735.000	100,00	100,00	293	969.796.230	77%	128%	APBD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II					
17		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Pemeliharaan EWS tsunami, EWS banjir dan EWS longsor	60	1.023.760.800	21	415.092.700	21	54.665.500	3,36	5.125.000	4	7.345.650	7	12.470.650	78,00	22,81	7,36	427.563.350	12%	42%	APBD
18		Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	Pendirian posko lapangan dan apel siaga	72	3.829.060.015	48	1.641.714.014	12	125.966.500	3	87.045.855	3	15.616.661	6	102.662.516	83,17	81,50	6	1.744.376.530	8%	46%	APBD
19		Tim Kaji Bencana	Dokumen kajian bencana	60	186.989.430	4	112.507.900	1	5.437.300	0,21	1.661.500	0,54	1.967.000	0,75	3.628.500	75,00	66,73	0,75	116.136.400	75%	62%	APBD
20		Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	Pengelolaan logistik	72	3.490.137.130	48	635.993.349	12	222.860.800	3	144.125.700	3	5.930.000	6	150.055.700	67,87	67,33	6	786.049.049	67,87	23%	APBD
21		Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdal-op PB)	Penanganan tanggap darurat kebencanaan Penyediaan tenaga kebencanaan	72	1.689.860.500	48	907.046.969	12	330.333.200	3	64.707.050	3	80.125.200	6	144.832.250	52,00	43,84	6	1.051.879.219	52	62%	APBD



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Sumber Dana			
				I	II	I	II	I	II	I	II		I	II	I	II						
22		Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Gladi personil dan masyarakat  Gladi personil posko Pusdalop	2.50 0	1.220.732. 100	2.23 0	690.125.7 13	0		-		0		-	0,00	0,00	0	690.125. 713	0	57%	APBD	
23		Pemberdayaa n Masyarakat Pasca Bencana	Masyarakat korban bencana yang dilatih		223.281.10 0			0		-				-	0,00	0,00						
24		Pelatihan Recovery Pasca Bencana	Pelatihan 30 tenaga recovery pasca bencana	150	369.670.90 0	90	184.413.5 77	0	22.833.1 00	0	4.774.3 00	0	18.058. 800	0	22.833.1 00	100, 00	100, 00	0	207.246. 677	0%	56%	APBD

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan s/d Bulan Juni 2020**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	TARGET			REALISASI		
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)
<b>I</b>	<b>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</b>	<b>8.445.800</b>	<b>Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial</b>			<b>8.445.800</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b> %	<b>8.445.600</b>	<b>100,00%</b>
1	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	8.445.800	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Dokumen	100 %	8.445.800	100,00%	100 %	8.445.600	100,00%
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>241.257.870</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>134.986.200</b>	<b>55,95%</b>	<b>57</b> %	<b>125.207.206</b>	<b>51,90%</b>
2	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	15.585.500	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Bulan	52,42 %	8.170.200	52,42%	52 %	7.682.200	49,29%
3	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.694.470	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	50,71 %	53.085.370	50,71%	51 %	48.018.876	45,87%
4	Pengelolaan Kebersihan Kantor	29.397.400	Layanan kebersihan kantor	Bulan	55,53 %	14.479.000	49,25%	56 %	14.479.000	49,25%
5	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	91.580.500	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	64,70 %	59.251.630	64,70%	65 %	55.027.130	60,09%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>193.506.600</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik</b>			<b>132.704.734</b>	<b>68,58%</b>	<b>70</b> %	<b>125.653.019</b>	<b>64,93%</b>

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	TARGET			REALISASI		
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.057.200	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit/th	60,33 %	6.067.500	60,33%	60 %	5.312.500	52,82%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.084.000	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit/th	78,03 %	35.179.434	78,03%	79 %	35.179.434	78,03%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	88.995.600	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	unit/th	47,29 %	42.088.000	47,29%	50 %	36.247.385	40,73%
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.369.800	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	100 %	49.369.800	100,00%	100 %	48.913.700	99,08%
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>3.464.500</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>			<b>3.464.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 %</b>	<b>3.464.500</b>	<b>100,00%</b>
10	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	3.464.500	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Orang	100 %	3.464.500	100,00%	100 %	3.464.500	100,00%
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>25.755.500</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>20.926.500</b>	<b>81,25%</b>	<b>81,1 %</b>	<b>18.624.100</b>	<b>72,31%</b>
11	Penyusunan Pelaporan Keuangan	9.678.400	Dokumen palaporan keuangan	Dokumen	52,81 %	5.111.600	52,81%	53 %	4.941.500	51,06%
12	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	16.077.100	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dokumen	98,37 %	15.814.900	98,37%	98 %	13.682.600	85,11%

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	TARGET			REALISASI		
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)
<b>VI</b>	<b>Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan</b>	<b>61.852.000</b>	<b>Persentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan</b>			<b>25.623.800</b>	<b>41,43%</b>	<b>49 %</b>	<b>24.366.000</b>	<b>39,39%</b>
13	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	61.852.000	Dokumen data dasar pembangunan Penyediaan tenaga kebencanaan	Dokumen Bulan	48,63 %	25.623.800	41,43%	49 %	24.366.000	39,39%
<b>VII</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>1.154.190.000</b>	<b>Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani</b>			<b>673.867.466</b>	<b>58,38%</b>	<b>63,11 %</b>	<b>640.067.266</b>	<b>55,46%</b>
			<b>Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana</b>							
			<b>Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan</b>							
			<b>Cakupan wilayah pencegahan bencana</b>							
			<b>Kelompok jejaring kebencanaan</b>							
			<b>Persentase ketersediaan analisis jenis bencana</b>							
			<b>Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana</b>							
14	Posko Siaga SAR	322.000.800	Layanan Posko Siaga SAR Penyediaan tenaga	Pos Bulan	49,92 %	134.042.000	41,63%	50 %	133.542.000	41,47%

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	TARGET			REALISASI		
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)
15	Pelatihan SAR Penanganan Bencana	66.357.800	kebencanaan Personil SAR terlatih	Orang	100 %	66.357.800	100,00%	100 %	66.307.550	99,92%
			Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Orang						
16	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	3.735.000	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	desa/kel	100 %	3.735.000	100,00%	100 %	3.735.000	100,00%
			Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa						
17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	54.665.500	Pemeliharaan EWS tsunami, EWS banjir dan EWS longsor	Unit	77,59 %	42.415.500	77,59%	78 %	12.470.650	22,81%
18	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	125.966.500	Pendirian posko lapangan dan apel siaga	Bulan	83,17 %	104.768.516	83,17%	83,17 %	102.662.516	81,50%
19	Tim Kaji Bencana	5.437.300	Dokumen kajian bencana	Dokumen	66,73 %	3.628.500	66,73%	75 %	3.628.500	66,73%
20	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	222.860.800	Pengelolaan logistik	Bulan	67,87 %	151.244.800	67,87%	67,87 %	150.055.700	67,33%
21	Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	330.333.200	Penanganan tanggap darurat kebencanaan	Bulan	51,94 %	144.842.250	43,85%	52 %	144.832.250	43,84%
			Penyediaan tenaga kebencanaan	Bulan						
22	Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	-	Gladi personil dan masyarakat	Orang	0,00 %	-	0,00%	0 %	-	0,00%
			Gladi personil posko Pusdalop	Orang						

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	TARGET			REALISASI		
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)
23	Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	-	Masyarakat korban bencana yang dilatih	Orang	0,00 %	-	0,00%	0 %		0,00%
24	Pelatihan Recovery Pasca Bencana	22.833.100	Pelatihan 30 tenaga recovery pasca bencana	Orang	100 %	22.833.100	100,00%	100 %	22.833.100	100,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.688.472.270</b>			<b>62,76 %</b>	<b>1.000.019.000</b>	<b>59,23%</b>	<b>63,05 %</b>	<b>945.827.691</b>	<b>56,02%</b>

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan Renstra 2016 – 2021 adalah Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Daerah. indikator cakupan pelayanan penanggulangan bencana, target 100% pada setiap tahunnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung oleh Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /Sosial dengan indikator program :

1. Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial

Dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator program:

1. Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani
2. Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana
3. Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayah
4. Cakupan wilayah pencegahan bencana
5. Kelompok jejaring kebencanaan
6. Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana
7. Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja Tahun 2019 capaian sasaran strategis sebesar 100% dengan telah terpenuhinya dua indikator sasaran, yaitu Cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan capaian dukungan terhadap kinerja perangkat daerah. Terdapat 6 program pada tahun 2019, dengan rincian 1 program teknis (urusan) dengan 9 indikator dan 5 program kesekretariatan (non urusan) dengan 5 indikator program.

Capaian kinerja pada non urusan dapat tercapai 100% sedangkan pada urusan dengan 9 indikator terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, 4 indikator diatas target dan 2 indikator sesuai target.

Table 2.3  
Capaian program tahun 2019

No	Program Indikator	Kinerja Fisik		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggu- langan Bencana Daerah			
	Kelompok Jejaring Kebencanaan	16 wilayah	16 wilayah	100%
	Cakupan wilayah pencegahan bencana	100%	80,48%	80,48%
	Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana	100%	87,50%	87,50%
	Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	18,29%	7,32%	40,21%
	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	100%	100%	100%
	Tingkat pemberdayaan masyarakat pascabencana	40%	41%	102,5%
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	60%	87%	145%
	Jumlah DesaTangguh Bencana	50 desa	56 desa	112%
	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	75%	99%	132%
2	Program PelayananAdministrasi			
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
3	Program PeningkatanSarana dan Prasarana			
	Cakupan saranaprasarana aparatuyang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			
	Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
5	Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Prosentase peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%
6	Program PenyusunanDataDasar			
	Prosentase TersedianyaData Dasar Pembangunan	100%	100%	100%

Ada 3 indikator program yang tidak tercapai target. Pada indikator cakupan wilayah pencegahan bencana hanya tercapai



80,48%, indikator ini menggambarkan Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang disosialisasi kebencanaan terhadap seluruh desa rawan bencana (Jumlah desa/kelurahan rawan bencana menurut KRB tahun 2014 sebanyak 328 desa) luasnya cakupan 328 desa serta terbatasnya pendanaan dan sumber daya aparatur menjadi salah satu permasalahannya.

Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana menggambarkan Persentase jumlah dokumen kebencanaan yang harus dimiliki terhadap jumlah dokumen kebencanaan yang seharusnya dimiliki (ada 8 dokumen yang harus diterbitkan), Reviu dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang telah diterbitkan tahun 2014 hanya berlaku hingga 2018. KRB Tahun 2014 disusun oleh BNPB dengan dana yang relatif besar karena melibatkan ahli dengan kajian yang cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Karena keterbatasan anggaran, pada tahun 2019 hanya menyusun Reviu Dokumen Kontijensi Banjir.

Indikator Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan adalah Presentase ketersediaan alat deteksi kebencanaan dan atau peralatan kebencanaan terhadap jumlah desa/kelurahan rawan bencana (Jumlah desa/kelurahan rawan bencana 328) merupakan cermin kesiapsiagaan sarana prasarana berupa *software* dan *hardware* dalam penanggulangan bencana. Hingga tahun 2019 pendataannya belum optimal terutama yang dimiliki oleh Non BPBD.

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pencapaian target program dan kegiatan. Secara fisik banyak aktifitas yang terbatas dilaksanakan selama pandemi dan dari sisi keuangan banyak terjadi refocusing/ realokasi pada program kegiatan percepatan penanganan Covid-19.

Tabel 2.4 Analisis Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat Daerah		<b>N I H I L</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana di daerah	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka BPBD saat ini berada dalam lingkungan strategis yang memiliki kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun kondisi eksternalnya berupa peluang serta ancaman yang harus dihadapi untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya dalam bidang kebencanaan daerah secara paripurna.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BPBD didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Keterbatasan sumberdaya aparatur yang berkompeten, jumlah PNS BPBD hanya terdiri atas 26 orang;
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang administrasi kantor maupun penanganan bencana;
- Dukungan sumberdaya dari *stakeholder* di luar pemerintah (relawan, perusahaan/dunia usaha, lembaga donor, dll) ketika terjadi bencana belum terkoordinir.
- Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Tantangan yang dihadapi BPBD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- a. Sebagai OPD yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dituntut akuntabilitas dalam layanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik dan *respon time* yang cepat;
- c. Wilayah Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana;
- d. Koordinasi antar *stakeholder* yang masih lemah.
- e. Rendahnya kesadaran *stakeholder* tentang kewajiban penanggulangan bencana.

- f. Pola pikir (*mindset*) sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penanggulangan bencana merupakan kewajiban pemerintah.
- g. Meningkatnya jumlah relawan dan kelompok sadar bencana perlu mendapatkan pembinaan yang terprogram.

Dari isu-isu tersebut diatas dapat di kelompokkan bahwa isu strategis pada BPBD adalah belum optimalnya penanganan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

### **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah;

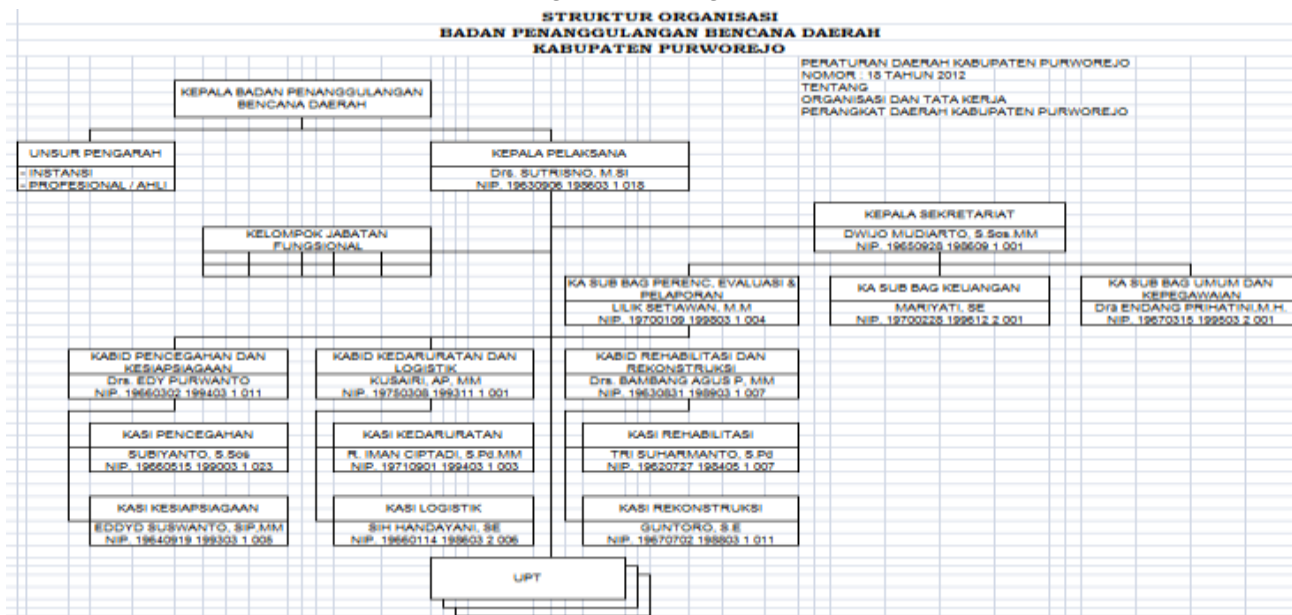
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
- d. Pembinaan UPT dalam lingkup penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi



### **2.3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber dayam manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan Arah kebijakan dan strategi untuk prioritas nasional dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

- a. Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (1) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

- b. Peningkatan Ketahanan Iklim yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (1) Peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) Peningkatan ketahanan iklim sektor air; (3) Peningkatan ketahanan iklim sektor pertanian melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial; serta (4) Peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan.

### 3. Pembangunan Rendah Karbon.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

- a. Pembangunan Energi berkelanjutan
- b. Pemulihan lahan berkelanjutan
- c. Penanganan limbah
- d. Pengembangan industri hijau
- e. Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan

Berdasarkan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, beberapa strategi dan kebijakan masih relevan dan memiliki keterkaitan dengan kondisi di Kabupaten Purworejo. Mengutip strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :

Strategi :

1. Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah
2. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat
5. Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jawa Tengah
6. Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana
7. Menyelenggarakan simulasi , latihan gabungan antar pemangku kepentingan



8. Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan
9. Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana
10. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana
11. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana
12. Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana
13. Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana
14. Jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana
15. Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Jateng secara kewilayahan dalam upaya mendekati dengan potensi bencana
16. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD
17. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada Hasil

Kebijakan :

1. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana
2. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah
3. Memfungsikan BPBD untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana
4. Menjadikan BPBD Provinsi Jateng sebagai *incident commander* dalam tanggap darurat bencana
5. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
6. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten /kota risiko bencana
7. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana

8. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana
9. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi
10. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana
11. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana
12. Pengadaan sarana dan prasarana PB
13. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistik dan peralatan sesuai standar
14. Meningkatkan kemampuan aparaturnya PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
15. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
17. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah
18. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
19. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
20. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu.

BPBD Kabupaten Purworejo berdasarkan Perda No: 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memiliki fungsi, diantaranya sebagai pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dengan demikian program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan memiliki hubungan langsung dengan skala prioritas pembangunan nasional dan selaras dengan strategi dan kebijakan BPBD Provinsi Jawa Tengah.

### **2.3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan tahun kelima sebagaimana tertuang di dalam Renstra BPBD Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan	I	: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
Sasaran	I	: Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	I	: Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
Sasaran	II	: Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
Indikator Sasaran	II	: Cakupan pelayanan penanggulangan bencana

Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 beserta indikator dan target tahun 2020 secara lebih detail dapat dilihat pada table 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Program Tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Program
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	Pelayanan administrasi perkantoran
			100%	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
			100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
			100%	Penyusunan Data Dasar pembangunan
	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah
			75%	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Perumusan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-6) dan kebutuhan khusus. Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Tahun 2020 mencakup 7 program dan terdiri 22 kegiatan yaitu:

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1. Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan;
  - 2. Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3. Pengelolaan Kebersihan Kantor;
  - 4. Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal.
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
  - 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.
- E. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
  - 1. Penyusunan Data Dasar Pembangunan.
- F. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
  - 1. Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana.
- G. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Posko Siaga SAR;
2. Pelatihan SAR Penanganan Bencana;
3. Penyuluhan Daerah Rawan Bencana;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
5. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
6. Tim Kaji Bencana;
7. Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam;
8. Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (PusdalopPB);
9. Pelatihan *Recovery* Pasca Bencana.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Kegiatan Baru/ Perubahan Nama Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Keg.
						Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / pagu indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	a/b/c	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>TOTAL</b>									3.365.727.700	1.979.913.920	(1.385.813.780)					3.344.685.700,00	
1	Usuran Wajib Pelayanan Dasar																	
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									40.500.000	19.816.700	(20.683.300)					44.550.000,00	
14.16	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial			Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial			75.00 %	75.00 %	40.500.000	19.816.700	(20.683.300)				75.00 %	44.550.000,00	
14.164	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana			Verifikasi Perbaikan Perumahan AkibatBencana	Verifikasi Perbaikan Perumahan AkibatBencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1.00 Dok	1.00 Dok	40.500.000	19.816.700,00	(20.683.300)	DAU	DAU	1.00 Dok		44.550.000,00	a
15	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat									3.325.227.700	1.960.097.220	(1.365.130.480)					3.300.135.700,00	
151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100.00 %	100.00 %	423.978.900	241.257.870	(182.721.030)				100.00 %	466.376.790,00	
15.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan		Aparatur	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	BPBD	BPBD	12.00 Bulan	12.00 Bulan	29.447.900	15.585.500,00	(13.862.400)	DAU	DAU	12.00 Bulan		32.392.690,00	a
15.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Aparatur	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	BPBD	BPBD	12.00 Bulan	12.00 Bulan	123.158.000	104.694.470,00	(18.463.530)	DAU	DAU	12.00 Bulan		135.473.800,00	a
15.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor		Aparatur	Layanan kebersihan kantor	Layanan kebersihan kantor	BPBD	BPBD	12.00 Bulan	12.00 Bulan	34.266.700	29.397.400,00	(4.869.300)	DAU	DAU	12.00 Bulan		37.693.370,00	a
15.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal		Aparatur	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	BPBD, Dalam Daerah, Luar Daerah	BPBD, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	12.00 Bulan	237.106.300	91.580.500,00	(145.525.800)	DAU	DAU	12.00 Bulan		260.816.930,00	a
152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik			100.00 %	100.00 %	253.905.500	213.506.600	(40.398.900)				100.00 %	375.080.340,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Kegiatan Baru/ Perubahan Nama Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Keg.
						Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / pagu indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19							
15.213	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Aparatur	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	BPBD	BPBD	18.00 Unit/Th	18.00 Unit/Th	21.709.400	10.057.200,00	(11.652.200)	DAU	DAU	18.00 Unit/Th	23.880.340,00	A	
15.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Aparatur	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	BPBD	BPBD	1.00 Unit/Th	1.00 Unit/Th	72.200.700	45.084.000,00	(27.116.700)	DAU	DAU	1.00 Unit/Th	85.000.000,00	A	
15.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Aparatur	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	BPBD	BPBD	24.00 Unit/Th	24.00 Unit/Th	109.995.600	108.995.600,00	(1.000.000)	DAU	DAU	24.00 Unit/Th	266.200.000,00	A	
15.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Aparatur	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	BPBD	9.00 Unit	9.00 Unit	49.999.800	49.969.800,00	(30.000)	DAU	DAU	9.00 Unit	0,00	A	
155	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>			<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>94.605.200</b>	<b>3.464.500</b>	<b>(91.140.700)</b>			<b>100.00 %</b>	<b>417.082.792,00</b>		
1.551	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Koordinasi penyelenggaraan uji sertifikasi profesi	Luar Daerah	Luar Daerah	50.00 Org	2 Kali	94.605.200	3.464.500,00	(91.140.700)	DAU	DAU	50.00 Org	417.082.792,00	a	
156	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>Prosentase capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>39.366.000</b>	<b>25.755.500</b>	<b>(13.610.500)</b>			<b>100.00 %</b>	<b>81.141.642,00</b>		
1.565	Penyusunan Pelaporan Keuangan		Aparatur	Dokumen pelaporan keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	BPBD	BPBD	18.00 Dok	18.00 Dok	19.999.300	9.678.400,00	(10.320.900)	DAU	DAU	18.00 Dok	40.000.000,00	a	
1.566	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan		Aparatur	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	BPBD	BPBD	6.00 Dok	6.00 Dok	19.366.700	16.077.100,00	(3.289.600)	DAU	DAU	6.00 Dok	41.141.642,00	a	
157	<b>Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan</b>			<b>Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan</b>	<b>Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan</b>			<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>69.329.600</b>	<b>61.852.000</b>	<b>(7.477.600)</b>			<b>100.00 %</b>	<b>333.463.280,00</b>		
1.571	Penyusunan Data Dasar Pembangunan		Aparatur	Dokumen data dasar pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	BPBD	BPBD	1.00 Dok	1.00 Dok	69.329.600	61.852.000,00	(7.477.600)	DAU	DAU	1.00 Dok	333.463.280,00	a	
				Penyediaan tenaga kebencanaan	Penyediaan tenaga kebencanaan	BPBD	BPBD	12.00 Bulan	12.00 Bulan			-			12.00 Bulan			
1.5.20	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			<b>Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani</b>	<b>Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani</b>			<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2.444.042.500</b>	<b>1.414.260.750</b>	<b>(1.029.781.750)</b>			<b>100.00 %</b>	<b>4.891.649.133,00</b>		
				Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana			60.00 %	60.00 %			-			60.00 %			



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Kegiatan Baru/ Perubahan Nama Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Keg.
						Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / pagu indikatif			Sumber Dana					
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
				Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan			24.39 %	24.39 %			-			24.39 %			
				Cakupan wilayah pencegahan bencana	Cakupan wilayah pencegahan bencana			100.00 %	100.00 %			-			100.00 %			
				Kelompok jejaring kebencanaan	Kelompok jejaring kebencanaan			16.00 wilayah	16.00 wilayah			-			16.00 wilayah			
				Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana	Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana			100.00 %	100.00 %			-			100.00 %			
				Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana			40.00 %	40.00 %			-			40.00 %			
15.201	Posko Siaga SAR		Masyarakat	Layanan Posko Siaga SAR	Layanan Posko Siaga SAR	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3.00 pos	0.00 pos	386.822.000	322.000.800,00	(64.821.200)	DAU	DAU	3.00 pos	432.575.000,00	a	
				Penyediaan tenaga kebencanaan	Penyediaan tenaga kebencanaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	12.00 Bulan			-			12.00 Bulan			
15.202	Pelatihan SAR Penanganan Bencana		Masyarakat	Personil SAR Terlatih	Personil SAR Terlatih	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	60.00 Org	60.00 Org	138.919.400	66.357.800,00	(72.561.600)	DAU	DAU	60.00 Org	112.735.700,00	a	
				Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	60.00 Org	0.00 Org			-			60.00 Org			
15.203	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana		Masyarakat	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	80.00 Desa/Kel	80.00 Desa/Kel	183.240.300	55.735.000,00	(127.505.300)	DAU	DAU	80.00 Desa/Kel	112.735.700,00	a	
				Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10.00 Desa	0.00 Desa			-			10.00 Desa			
15.207	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana		Masyarakat	Pemeliharaan EWS tsunami, EWS banjir dan EWS longsor	Pemeliharaan EWS tsunami, EWS banjir dan EWS longsor	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	21.00 Unit	21.00 Unit	100.479.300	74.665.500,00	(25.813.800)	DAU	DAU	21.00 Unit	500.000.000,00	a	
152.010	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana		Masyarakat	Pendirian posko lapangan dan apel siaga	Pendirian posko lapangan dan apel siaga	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	12.00 Bulan	408.823.500	168.714.750,00	(240.108.750)	DAU	DAU	12.00 Bulan	1.488.615.573,00	a	
152.012	Tim Kaji Bencana		Masyarakat	Dokumen kajian bencana	Dokumen kajian bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1.00 Dok	1.00 Dok	14.514.800	9.118.300,00	(5.396.500)	DAU	DAU	1.00 Dok	53.146.830,00	a	
152.013	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam		Masyarakat	Pengelolaan logistik	Pengelolaan logistik	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	12.00 Bulan	546.876.700	328.597.300,00	(218.279.400)	DAU	DAU	12.00 Bulan	1.348.918.030,00	a	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Kegiatan Baru/ Perubahan Nama Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Keg.
						Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / pagu indikatif			Sumber Dana					
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
152.01 4	Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop- PB)		Masyarakat	Penanganan tanggap darurat kebencanaan	Penanganan tanggap darurat kebencanaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	12.00 Bulan	350.000.600	330.333.200,0 0	(19.667.400)	DAU	DAU	12.00 Bulan	399.300.000,00	a	
				Penyediaan tenaga kebencanaan	Penyediaan tenaga kebencanaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	12.00 Bulan			-			12.00 Bulan			
152.02 1	Pelatihan Recovery Pasca Bencana		Masyarakat	Pelatihan 30 tenaga recovery pasca bencana	Pelatihan 30 tenaga recovery pasca bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	30.00 Org	30.00 Org	79.400.000	58.738.100,00	(20.661.900)	DAU	DAU	30.00 Org	96.630.600,00	a	

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Catatan Penting**

Mengacu pada asumsi Pemerintah Pusat, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo yang semula dalam RKPD Tahun 2020 ditetapkan 6,64% mengalami penurunan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 2,3% menyesuaikan adanya bencana non alam akibat pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan asumsi ini akan berdampak langsung kepada target pendapatan daerah yang akhirnya akan berdampak pula terhadap rencana belanja daerah untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta berdampak tidak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah.

Kegiatan-kegiatan yang mengalami dampak pandemi Covid-19 berupa pengurangan bahkan penghapusan pagu anggaran berdampak pula pada capaian sasaran, program dan kegiatan pada tahun ini. Keadaan ini berakibat target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana Kerja Tahun 2020 tidak akan dapat dicapai. Dengan demikian target Renstra 2016-2021 serasa berat untuk dicapai apabila tahun 2021 tidak ada terobosan yang signifikan.

### **4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman dalam menyusun RKAP/DPPA baik pada kegiatan maupun penganggaran. Indikator dan target kinerja pada renja merupakan target minimal, sedangkan plafon anggaran merupakan batas maksimal.

Rencana Kerja Perubahan ini agar dijadikan pedoman bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar perubahan anggaran dan perubahan target kinerja dapat dicapai pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran.

#### **4.3. Rencana tidak lanjut**

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kinerja Perubahan perlu beberapa langkah/rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat lunak sesuai regulasi yang telah ditetapkan
2. Menempatkan personel sesuai kompetensi yang dimiliki
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi internal
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat

Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo 27 Juli 2020

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Purworejo



**Drs SUTRISNO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630906 198603 1 018